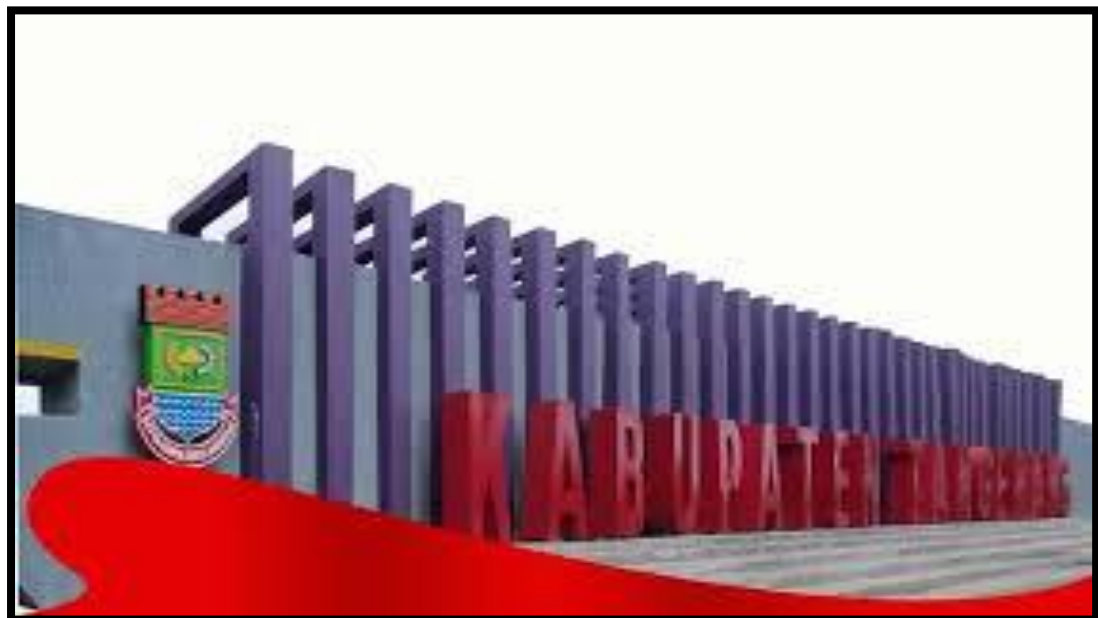


**RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023**



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

Komplek Perkantoran Tigaraksa Telp. 5994839, 5994870 Fax 5994840

Tigaraksa – Tangerang 15720

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 900/ 39 -Setwan

TENTANG
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja Tahunan SKPD sebagai penjabaran pentahapan pelaksanaan program dan kegiatan dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023;
- b. bahwa Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana huruf a tersebut diatas, merupakan pedoman bagi seluruh jajaran organisasi di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan;
- c. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan pedoman tersebut sebagaimana pada huruf (b) diatas, maka dipandang perlu Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2023 untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Nasional;
12. Permendagri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Daerah/ Kementerian Dalam Negeri;
13. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;
18. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : 1. Keputusan DPRD No. 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tangerang.
2. Keputusan DPRD No. 188.4/ Tentang RENJA DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang tentang Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Tahun 2023.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai;
- b. Rencana Kerja (RENJA) adalah suatu dokumen perencanaan jangka pendek untuk periode waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit kerja organisasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari organisasi induk Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi;

- e. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
- f. Tujuan adalah sesuatu sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu;
- g. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu;
- h. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk pelaksanaan;
- i. Program adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang mempunyai arah, tujuan dan sasaran yang sama dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
- j. Kegiatan adalah aktivitas rutin sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh organisasi dalam rangka mewujudkan target dan sasaran program.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 3

Sistematika penulisan dari Rencana Kerja Sekretariat DPRD Perubahan Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	PENUTUP

Pasal 4

Isi serta uraian rincian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal: 27 Juli 2022

Plt. **SEKRETARIS DPRD**
KABUPATEN TANGERANG



Drs. DADANG NUGRAHA
NIP. 196610311986031004



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

Komplek Perkantoran Tigaraksa Telp. 5994839, 5994870 Fax 5994840

Tigaraksa – Tangerang 15720

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 900/ 40 -Setwan

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja Tahunan SKPD sebagai penjabaran pentahapan pelaksanaan program dan kegiatan dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023;
- b. bahwa Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana huruf a tersebut diatas, merupakan pedoman bagi seluruh jajaran organisasi di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan;
- c. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyusunan Renja Sekretariat DPRD maka dipandang perlu mementuk Tim Penyusun Renja DPRD Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Nasional;
9. Permendagri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Daerah/ Kementerian Dalam Negeri;
10. Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;

Memperhatikan : 1. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
2. Keputusan DPRD No. 188.4/ Tentang RENJA DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD Penanggung Jawab
2. Kepala Bagian Program dan Keuangan Ketua
3. Kepala Bagian Umum Wakil Ketua
4. Kepala Bagian Persidangan dan Per UU Wakil Ketua
5. Kepala Bagian Fasilitasi dan Pengawasan Wakil Ketua
6. Kasubag Perencanaan dan Penganggaran Sekretaris
7. Kasubag Verifikasi Anggota
8. Kasubag Akuntansi dan Pelaporan Anggota
9. Kasubag Umum dan Kepegawaian
10. Kasubag RT dan Perlengkapan Anggota
11. Kasubag Humas, Protokol dan Publikasi Anggota
12. Kasubag Kajian Per UU
13. Kasubag Persidangan dan Risalah Anggota
14. Kasubag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Anggota
15. Kasubag Pengawasan dan Kerja Sama. Anggota

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 27 Juli 2022

Plt. **SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANGERANG**



Drs. DADANG NUGRAHA
NIP. 196610311986031004



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Komplek Perkantoran Tigaraksa Telp. 5994839, 5994870 Fax 5994840

Tigaraksa – Tangerang 15720

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023. Rencana Kerja ini merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud penjabaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan oleh satuan unit organisasi.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan bentuk komitmen dan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kerja yang kami susun ditetapkan pula pencapaian kinerja tahunan yang diukur berdasarkan indikator kinerja pada setiap tingkat sasaran.

Target kinerja merupakan kuantifikasi dari seluruh pengukuran indikator kinerja, dimana hasil akhir dari proses pengukuran tersebut dapat menunjukkan keberhasilan organisasi pada setiap akhir periode pelaksanaan.

Dokumen Rencana Kerja ini merupakan salah satu dari komponen akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan kemudian diakhiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kami menyadari bahwa hasil penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna baik dari penyajian maupun cakupan informasi yang diharapkan. Untuk itu kritik dan saran dari para *stakeholder* sangat kami harapkan untuk perbaikan pada penyusunan Rencana Kerja yang akan datang.

Kami berharap Rencana Kerja yang kami susun, dapat dijadikan sebagai acuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam merumuskan kegiatan, serta menilai tingkat pencapaian kinerja organisasi.

Tigaraksa, Juli 2022
Pt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANGERANG

Drs. DADANG NUGRAHA
NIP. 196610311086031004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2021	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022.....	19
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD	33
2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	43
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	44
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	55
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	56
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	56
3.3 Program dan Kegiatan	57
3.4. Target Kinerja Program dan Kegiatan	67
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	77
BAB V : P E N U T U P	83

LAMP IRAN



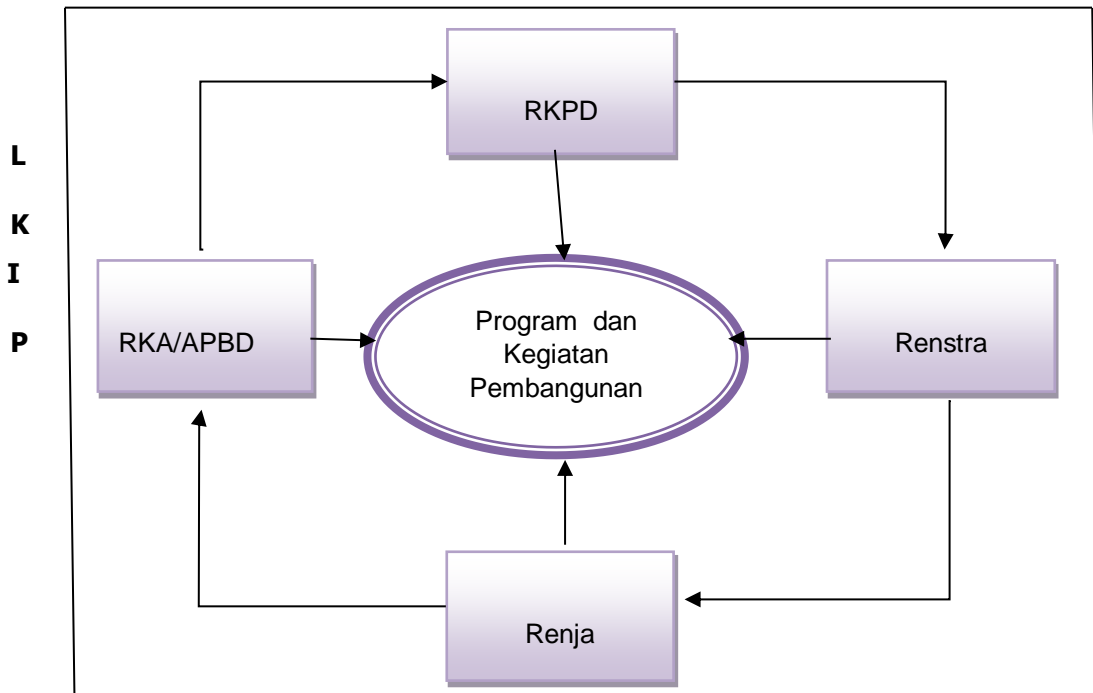
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.



L K I P

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang, Rencana Kerja



(Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan yang wajib dibuat oleh seluruh SKPD.

Sebagai Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, Renja OPD merupakan pedoman pelaksanaan perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan OPD guna mencapai visi yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dasar dalam melaksanakan penilaian kinerja instansi pemerintah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. Permendagri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Daerah/Kementerian Dalam Negeri;
14. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Permendagri Nomor.... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Kegiatan Pertemuan/Rapat Diluar Kantor;
20. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang;
21. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019–2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023, dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD, sebagai implementasi dari pentahapan Rencana Strategis yang memuat tentang kumpulan kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
2. Sebagai acuan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);



3. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan SKPD dalam mengemban visi dan misi pemerintah daerah;
5. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh jajaran organisasi Sekretariat DPRD dalam pencapaian visi dan misi;
7. Adanya Renja diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan motivasi seluruh jajaran organisasi Sekretariat DPRD yang benar-benar terarah dalam pencapaian hasil dan target kinerja;
8. Diharapkan Renja dapat dijadikan tolok ukur kinerja dan evaluasi secara obyektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

1.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggara Administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Fasilitasi penyelenggaraan fungsi penganggaran, pengawasan dan pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD;
- e. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam melaksanakan fungsinya Sekretariat DPRD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja, melaksanakan kebijakan strategis dan teknis fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD di bidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan;
- b. Mengkoordinasikan fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD bidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan;



- c. Membina, mengawasi, mengendalikan dan melaksanakan tugas kesekretariatan serta perencanaan dan keuangan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya;
- e. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan tenaga ahli fraksi;
- f. Mengevaluasi program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi lingkup Sekretariat DPRD;
- g. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi lingkup Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang teknis operasionalnya berada dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum.
 1. Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.
- c. Bagian Program dan Keuangan.
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran.
 2. Sub Bagian Verifikasi.
 3. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
 1. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan.
 2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah.
- e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
 1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi.
 2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang

Bagian Umum berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD;

Bagian Umum mempunyai fungsi :



- a. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- d. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- f. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
- g. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD.
- h. Penyelenggaraan bimbingan teknis pegawai Sekretariat DPRD;
- i. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan kebutuhan kerja alat kelengkapan DPRD dan kesehatan DPRD;
- j. Pelaksanaan administrasi pendataan keanggotaan DPRD;
- k. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- l. Penyediaan fasilitasi fraksi DPRD.

Bagian Umum terdiri atas :

- Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
- Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.

1). *Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian*

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian umum.

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
- c. Melaksanakan kearsipan;
- d. Melaksanakan administrasi Sekretariat DPRD;
- e. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. Menyiapkan bahan administrasi pegawai;
- g. Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- h. Mengelola administrasi perjalanan dinas pegawai Sekretariat DPRD;



- i. Mempersiapkan, mengusulkan atau menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai Sekretariat DPRD;
- j. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan dan kearsipan serta perjalanan dinas pegawai Sekretariat DPRD kepada bawahan dilingkup sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
- k. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkungan sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
- m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2). Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian umum.

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan anggaran dan kegiatan tahunan Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- b. Mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
- c. Mengatur dan memelihara halaman dan taman dikomplek Sekretariat DPRD;
- d. Mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
- e. Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
- f. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- g. Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
- h. Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- i. Menyediakan, mengurus, menyimpan serta mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- j. Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas Sekretariat DPRD;
- k. Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD
- l. Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;



- m. Membagi tugas pelaksanaakan kegiatan kerumahtanggaan, pengadaan perlengkapan dan barang/aset daerah serta pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor/gedung lingkup sub bagian rumah tangga dan perlengkapan;
- n. Membimbing pelaksanaan kegiatan sub bagian rumah tangga dan perlengkapan kepada bawahan;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian rumah tangga dan perlengkapan;
- p. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian rumah tangga dan perlengkapan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3). Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.

Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian umum.

Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian humas, protokol dan publikasi;
- b. Merencanakan kegiatan DPRD;
- c. Menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
- d. Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- e. Menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- f. Merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;
- g. Merancang administrasi kunjungan kerja pimpinan DPRD;
- h. Memfasilitasi dalam penerimaan tamu kunjungan kerja;
- i. Mengelola administrasi perjalanan dinas daerah pimpinan dan anggota DPRD;
- j. Memfasilitasi layanan kebutuhan kerja alat kelengkapan DPRD;
- k. Memfasilitasi pelayanan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD;
- l. Melakukan administrasi pendataan keanggotaa DPRD;
- m. Mengelola administrasi keanggotaat DPRD;
- n. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan penyusunan pelaksanaan kegiatan humas, protokol dan publikasi;
- o. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian humas, protokol dan publikasi;
- p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian



- humas, protokol dan publikasi;
- q. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian humas, protokol dan publikasi;
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang

Bagian Program dan Keuangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat DPRD.

Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- b. Pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- c. Pemverifikasian perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- d. Pemverifikasian perencanaan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- e. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- f. Pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
- g. Pengelolaan koordinasi anggaran Sekretariat DPRD;
- h. Pemverifikasian pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- i. Pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- k. Penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.

Bagian Keuangan terdiri atas :

- Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran.
- Sub Bagian Verifikasi.
- Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

1). Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran.

Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian program dan keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian perencanaan dan penganggaran;
- b. Menyusun bahan perencanaan;
- c. Menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
- d. Merencanakan perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;



- e. Merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- f. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran;
- g. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian perencanaan dan penganggaran;
- h. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian perencanaan dan penganggaran;
- i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan penganggaran;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2). Sub Bagian Verifikasi

Sub Bagian Verifikasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian program dan keuangan.

Sub Bagian Verifikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian verifikasi;
- b. Merencanakan pemverifikasian keuangan;
- c. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- d. Mengkoordinasikan kepada PPTK, bendahara dan pembantu PPK KD untuk pengajuan SPP dan SPM-UP/SMP-GU/SPM-TU/SPM-LS;
- e. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- f. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- g. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan verifikasi;
- h. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian verifikasi;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian verifikasi;
- j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian verifikasi;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya;

2). Sub Bagian Verifikasi

Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab



kepada kepala bagian program dan keuangan.

Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian akuntansi dan pelaporan;
- b. Merencanakan penatausahaan keuangan;
- c. Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Mengkoordinasikan kepada PPTK dan bendahara dalam melaksanakan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
- f. Menganalisa laporan keuangan;
- g. Menganalisa laporan kinerja;
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- i. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan akuntansi dan pelaporan;
- j. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian akuntansi dan pelaporan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian akuntansi dan pelaporan;
- l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian akuntansi dan pelaporan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya;

C. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat DPRD.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah inisiatif;
- d. Pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk peraturan perundang-undangan;
- e. Pengumpulan bahan penyiapan draft rancangan peraturan daerah inisiatif;
- f. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. Penyusunan risalah rapat;



- h. Pelaksanaan koordinasi pembahasan rancangan peraturan daerah;
- i. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventarisasi masalah
- j. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat.

Bagian Persidangan terdiri dari :

- Sub Bagian Kajian Perundang-undangan.
- Sub Bagian Persidangan dan Risalah.

1). Sub Bagian Kajian Perundang-undangan

Sub Bagian Kajian Perundang-undangan berkedudukan dan bertanggung jawab kepada kepala bagian persidangan dan perundang-undangan.

Sub Bagian Kajian Perundang-undangan mempunyai uraian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian kajian perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kajian perundang-undangan;
- c. Membuat konsep bahan penyusunan naskah akademik;
- d. Menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
- e. Membuat konsep bahan penyiapan draft peraturan inisiatif;
- f. Merancang bahan pembahasan peraturan daerah;
- g. Menyusun bahan daftar inventarisir masalah;
- h. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan kajian perundang-undangan;
- i. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian kajian perundang-undangan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian kajian perundang-undangan;
- k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian kajian perundang-undangan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2). Sub Bagian Persidangan dan Risalah

Sub Bagian Persidangan dan Risalah berkedudukan dan bertanggung jawab kepada kepala bagian persidangan dan perundang-undangan.

Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai uraian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian persidangan dan risalah;
- b. Merencanakan program serta jadwal rapat dan sidang;
- c. Menyusun risalah, notulen catatan rapat;



- d. Menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
- e. Memfasilitasi rapat DPRD;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRD;
- g. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD yang meliputi sarana, prasarana makanan dan minuman serta gaji staf fraksi;
- h. Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- i. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan persidangan dan risalah;
- j. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian persidangan dan risalah;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian persidangan dan risalah;
- l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian persidangan dan risalah;
- m. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan lingkup Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD;
- n. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD;
- o. Mengelola administrasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD, fasilitasi layanan kebutuhan kerja Alat Kelengkapan DPRD, fasilitasi pelayanan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD dan pendataan keanggotaan DPRD ;
- p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD;
- q. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Alat kelengkapan DPRD;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang

Bagian Penganggaran dan Pengawasan berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan KUA PPAS/kebijakan umum perubahan anggaran PPAS perubahan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan APBD/APBD perubahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan rancangan peraturan



- daerah pertanggung jawaban APBD;
- d. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan semesteran pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan keuangan pertanggung jawaban Bupati;
 - f. Penyusunan bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi Aspirasi Masyarakat;
 - h. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi perumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 - i. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
 - k. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - l. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi penyusunan pokok pikiran DPRD;
 - m. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah;
 - n. Pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis/peningkatan kapasitas DPRD;

Bagian Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari :

- Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi;
- Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama.

1). *Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi*

Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi.

Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi mempunyai uraian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi;
- b. Merencanakan pembahasan KUA PPAS/kebijakan umum perubahan perubahan anggaran PPAS perubahan;
- c. Menyusun bahan pembahasan APBD/APBD perubahan;
- d. Menyusun bahan pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- e. Menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis 6



(enam) bulan berikutnya;

- f. Menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawab Bupati;
- g. Menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Merencanakan kegiatan rapat dengar pendapat/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- i. Memfasilitasi reses DPRD;
- j. Menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- k. Menyusun pokok pikiran DPRD;
- l. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan fasilitasi penganggaran dan aspirasi;
- m. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi;
- o. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2). *Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama.*

Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi.

Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama mempunyai uraian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian fasilitasi pengawasab dan kerja sama;
- b. Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- c. Merancang bahan rapat internal DPRD;
- d. Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik;
- e. Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- f. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- g. Melaksanakan kerja sama Sekretariat DPRD dan DPRD;
- h. Mengelola administrasi perjalanan dinas dalam daerah pimpinan dan anggota DPRD;



- i. Pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis/peningkatan kapasitas DPRD;
- j. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengawasan dan kerja sama;
- k. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian fasilitasi pengawasan dan kerja sama;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian fasilitasi pengawasan dan kerja sama;
- m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian fasilitasi pengawasan dan kerja sama;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Sekretariat DPRD secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Sedangkan mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD secara teknis operasionalnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD sedangkan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional, maka sebagai unsur pelayanan Sekretariat DPRD dituntut dapat melaksanakan perannya pada setiap fungsi, diantaranya :

1. Peran Setwan pada fungsi Legislasi.
 - Kajian perda.
 - Evaluasi terhadap penyiapan penyusunan rancangan perda.
 - Penyusunan propemperda.
 - Penyusunan reperda inisiatif.
 - Pembahasan raperda inisiatif dan eksekutif.



2. Peran Setwan pada Fungsi Budgeting.
 - Perencanaan Program.
 - Perencanaan Anggaran.
 - Pelaksanaan Anggaran.
3. Peran Setwan pada Fungsi Pengawasan.
 - Evaluasi Anggaran dan Kinerja SKPD oleh DPRD
 - Kajian Pelaksanaan Kebijakan.
 - Analisis Pengaruh Masyarakat atas kebijakan yang diterapkan oleh Kepala Daerah.
 - Dukungan Data.

Selain ketiga fungsi tersebut Sekretariat DPRD mempunyai peran lain yaitu :

1. Peran terhadap Alat Kelengkapan Dewan.
2. Peningkatan SDM.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana.
4. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kesekretariatan.
5. Menjadi Publik Relation Kinerja DPRD.
6. Peningkatan Koordinasi Dengan SKPD atau Lembaga Terkait Lainnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian renja, proses penyusunan renja, keterkaitan antara renja dengan dokumen RKPD, Renstra, Renja Kabupaten dan kaitannya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD serta yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran OPD.
- 1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.
- 1.4. Sistematika Penulisan



Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD.
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.
- 2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3. Program dan Kegiatan
Penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV P E N U T U P.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022

Evaluasi Pelaksanaan Renja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran target program dan kegiatan yang telah ditetapkan guna mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

Evaluasi Renja dilakukan dengan menggunakan metode komparasi perbandingan, yaitu membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Setelah itu, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa yang akan datang.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Mengacu pada rencana strategis Tahun 2019-2023 serta rencana kerja tahunan, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2021 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah melaksanakan 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota meliputi 9 kegiatan dengan 24 sub kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD meliputi 8 kegiatan dengan 27 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh empat bagian lingkup Sekretariat DPRD. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dapat dilihat seperti dibawah.



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021
Kabupaten Tangerang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (2021)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.001	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian sasaran/program dalam Renja OPD terhadap RKPd dan Renstra OPD terhadap RPJMD								
4.02.001.201	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja SKPD								
4.02.001.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan		7 dok	7 dok	7 dok	100	7 dok		
4.02.001.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok		
4.02.001.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen laporan keuangan								
4.02.001.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya pemenuhan gaji ASN		1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok		
4.02.001.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan		1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok		
4.02.001.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan								



Sekretariat DPRD

		administrasi pegawai								
4.02.001.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya		350 stel	300 stel	300 stel	100	300 stel		
4.02.001.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang terfasilitasi Bimtek		50 orang	50 orang	50 orang	100	50 orang		
4.02.001.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana penunjang kantor								
4.02.001.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen penerangan kantor		5 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis		
4.02.001.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		6 jenis	7 jenis	6 jenis	85,71	7 jenis		
4.02.001.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		16 jenis	7 jenis	5 jenis	71,43	7 jenis		
4.02.001.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		4 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis		
4.02.001.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan		4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis		
4.02.001.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya jamuan makan tamu		1948 dus	5000 dus	4061 dus	81,22	5000 dus		
4.02.001.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya laporan kunjungan kerja		223 kali	85 kali	85 kali	100	85 kali		
4.02.001.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya mebel								
4.02.001.207.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel		2 jenis	3 jenis	1 jenis	33,33	3 jenis		
4.02.001.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa komunikasi								
4.02.001.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi		9 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit		
4.02.001.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya kebersihan kantor		16 orang	16 orang	16 orang	100	16 orang		



Sekretariat DPRD

4.02.001.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pegawai								
4.02.001.209.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas		33 unit	4 item	4 item	100	4 item		
4.02.001.209.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel		5 jenis	3 item	3 item	100	3 item		
4.02.001.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin		7 jenis	17 jenis	17 jenis	100	15 item		
4.02.001.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung		1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit		
4.02.001.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan prasarana gedung kantor		-	-	-	-	1 unit		
4.02.001.215	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pemenuhan administrasi keuangan DPRD								
4.02.001.215.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya gaji DPRD		50 orang	50 orang	50 orang	100	50 orang		
4.02.001.215.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya medical check up		38 orang	50 orang	16 orang	32,00	50 orang		
4.02.001.216	Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan rapat-rapat DPRD								
4.02.001.216.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terfasilitasinya rapat-rapat DPRD		41 kali	95 kali	85 kali	89,47	95 kali		
4.02.002	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan tugas dan fungsi DPRD								
4.02.002.201	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pembentukan peraturan daerah								
4.02.002.201.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksana pembahasan pra raperda		-	-	-	-	5 keg		



Sekretariat DPRD

4.02.002.201.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya raperda		14 perda	16 perda	8 perda	50,00	16 perda		
4.02.002.201.04	Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Tersedianya naskah akademik		-	-	-	-	8 dok		
4.02.002.201.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersedianya tata tertib		1 dok	1 dok	-	-	1 dok		
4.02.002.202	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pemenuhan pembahasan anggaran								
4.02.002.202.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS		1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali		
4.02.002.202.02	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS perubahan		1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali		
4.02.002.202.03	Pembahasan APBD	Terlaksananya pembahasan APBD		1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali		
4.02.002.202.04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya pembahasan APBD perubahan		1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali		
4.02.002.202.05	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya pembahasan laporan semesteran		1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali		
4.02.002.202.06	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Terlaksananya pembahasan Pertanggungjawana APBD		1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali		
4.02.002.203.01	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pemenuhan pengawasan pemerintahan								
4.02.002.203.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum		4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali		
4.02.002.203.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur		4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali		
4.02.002.203.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat		4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali		
4.02.002.203.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian		4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali		



Sekretariat DPRD

4.02.002.203.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya pengawasan tindaklanjut pemeriksaan laporan keuangan	-	-	-	-	4 kali		
4.02.002.204	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pemenuhan kapasitas DPRD							
4.02.002.204.02	Bimbingan Teknis DPRD	Terlaksananya bimtek Dewan	6 kali	6 kali	5 kali	83,33	6 kali		
4.02.002.204.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya publikasi dan dokumentasi	114 kali	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan		
4.02.002.204.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terfasilitasinya kegiatan fraksi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan		
4.02.002.204.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah fasilitasi hubungan masyarakat	90 kali	100 kali	91 kali	91,00	100 kali		
4.02.002.204.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersedianya program kerja DPRD	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok		
4.02.002.205	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan Reses							
4.02.002.205.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah laporan kunjungan kerja	-	3 kali	-	-	3 kali		
4.02.002.205.02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	-	-	-	-	100 dok		
4.02.002.205.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen reses	2 kali	3 kali	3 kali	100	3 kali		
4.02.002.206	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pemenuhan dokumen kode etik							
4.02.002.206.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersedianya dokumen kode etik	1 dok	1	-	-	1 dok		
4.02.002.207	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi							
4.02.002.207.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Terlaksananya konferensi pers	51 kali	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan		
4.02.002.208	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pemenuhan							



Sekretariat DPRD

		koordinasi dan konsultasi DPRD								
4.02.002.208.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi DPRD		77 kali	95 kali	91 kali	95,79	85 kali		
4.02.002.208.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersedianya dokumen laporan kinerja DPRD		1 dok	1 dok	-	-	1 dok		



Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 Sekretariat DPRD melaksanakan 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 9 kegiatan dengan 24 sub kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri atas 8 kegiatan dengan 27 sub kegiatan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja yang dituangkan dalam program dan kegiatan seperti tabel diatas seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya.

Dari 2 program, 17 kegiatan dan 51 kegiatan Tahun 2019 dan 2020 yang telah dilaksanakan apabila melihat persentase capaian kinerja telah mencapai rata-rata 80 sampai 100 persen, namun terdapat beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya masih belum memenuhi target. perbandingan Capaian realisasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2020 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Perbandingan Realisasi Program/Kegiatan
Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja/Keluaran Tahun 2012 – 2021

Kode	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
4.02.001	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/ Kota						
4.02.001.206 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18 jenis	14 jenis	77,78	7 jenis	5 jenis	71,42
4.02.001.206 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12100 dus	8695 dus	71,86	-	-	-
4.02.001.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
4.02.001.2.0 7.05	Pengadaan Mebeleur	-	-	-	3 item	1 item	33,33
4.02.001.2.1 5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						
4.02.001.2.1 5.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	50 orang	2 orang	4,00	50 orang	16 orang	32,00
4.02.001.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
4.02.001.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesi Lainnya	-	-	-	15 item	10 item	66,67
4.02.002	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						



4.02.002.201	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						
4.02.002.201.02	Pembahasan rancangan peraturan daerah	16 perda	8 perda	50,00	16 perda	8 perda	50,00
4.02.002.207	Pembahasan Kerja Sama Daerah						
4.02.002.207.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	60 kali	34 kali	56,67	-	-	-

Tabel 2.2. merupakan target capaian kinerja berdasarkan capaian per program, per kegiatan dan sub kegiatan yang targetnya dibawah 80 persen, apabila dilihat secara keseluruhan dari 2 program, 18 kegiatan dan 51 sub kegiatan terdapat program yang capaiannya rata-rata 80 – 100 persen namun pada pelaksanaan ada beberapa kegiatan yang capaian fisiknya 100 persen dan realisasi keuangannya masih dibawah 80 persen seperti pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perbandingan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2020 - 2021
Yang Realisasi Keuangan Dibawah 80 Persen.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
4.02.001	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						
4.02.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
4.02.01.02.01.06	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	-	-	-	7 dok	7 dok	64,00
4.02.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
4.02.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	300 org	300 org	47,53
4.02.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	50 org	50 org	53,76
4.02.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
4.02.01.02.06.01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	1 jenis	1 jenis	76,30
4.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	85 kali	85 kali	58,31



4.02.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
4.02.01.02.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	11 bulan	11 bulan	79,40	10 unit	10 unit	55,26
4.02.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
4.02.01.02.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	-	-	-	4 item	4 item	55,06
4.02.01.02.09.05	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	3 item	3 item	33,60
4.02.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	1 item	1 item	70,11
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD						
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah						
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan dan Publikasi	-	-	-	12 bulan	12 bulan	58,31

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 dan 2021 yang menghasilkan Realisasi seperti tabel 2.3. tersebut ada beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target realisasi antara lain:

- a. Sesuai edaran Bapak Bupati, adanya penundaan sejumlah kegiatan akibat pandemi Covid-19.
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas realisasi sesuai dengan pengajuan service pemeliharaan dan menyesuaikan dengan fluktuasi harga BBM yang berlaku.
- c. Pembahasan 14 Raperda yang semula direncanakan, terealisasi 8 Raperda.
- d. Reses semula di rencanakan 2 (dua) kali terealisasi 1 (satu) kali.
- e. Peningkatan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD dialokasikan untuk 50 orang anggota, realisasi hanya 2 orang yang menjalankan general check up.
- f. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah tidak ada penyerapan sehingga realisasinya belum memenuhi target.
- g. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah realisasi sesuai biaya tiket dan penginapan.
- h. Penyusunan Tata Tertib dan Kode Etik Tidak dilaksanakan karena belum adanya penyesuaian aturan yang terbaru.
- i. Pengembangan fasilitas komunikasi dan informasi realisasi sesuai release kegiatan DPRD.
- j. Pemeliharaan jasa perijinan dan operasional kendaraan dinas/jabatan sesuai dengan pengajuan dan perpanjangan STNK.



Dari tabel 2.2 tersebut pelaksanaan 2 program, 17 kegiatan dan 51 sub kegiatan Sekretariat DPRD terlihat adanya sub kegiatan belum mencapai target yang diharapkan yaitu 80 sampai 100 persen dan tabel 2.3. adalah kegiatan yang target realisasinya 100 persen namun realisasi keuangannya masih dibawah 80 persen. Sedangkan realisasi 2 program, 17 kegiatan dan 51 sub kegiatan yang telah mencapai atau memenuhi target dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Program dan Kegiatan Yang Telah Mencapai Target

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)
			Target Renja SKPD Tahun (2021)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	5	6	7	8=(7/6)	9
4.02.001	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					
4.02.001.201	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
4.02.001.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dok	7 dok	7 dok	100	7 dok
4.02.001.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok
4.02.001.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
4.02.001.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok
4.02.001.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/ Semesteran SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok
4.02.001.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
4.02.001.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	350 stel	300 stel	300 stel	100	300 stel
4.02.001.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50 orang	50 orang	50 orang	100	50 orang
4.02.001.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
4.02.001.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis
4.02.001.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 jenis	7 jenis	6 jenis	85,71	7 jenis
4.02.001.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis
4.02.001.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis
4.02.001.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1948 dus	5000 dus	4061	81,22	5000 dus



Sekretariat DPRD

4.02.001.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223 kali	85 kali	85 kali	100	85 kali
4.02.001.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
4.02.001.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit
4.02.001.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16 orang	16 orang	16 orang	100	16 orang
4.02.001.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
4.02.001.209.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33 unit	4 item	4 item	100	4 item
4.02.001.209.05	Pemeliharaan Mebel	5 jenis	3 item	3 item	100	3 item
4.02.001.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit
4.02.001.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	1 unit	1 unit	100	1 unit
4.02.001.215	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					
4.02.001.215.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	50 orang	50 orang	50 orang	100	50 orang
4.02.001.216	Layanan Administrasi DPRD					
4.02.001.216.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	41 kali	95 kali	85 kali	89,47	95 kali
4.02.002	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					
4.02.002.201	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					
4.02.002.201.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-	5 keg	4 keg	80,00	5 keg
4.02.002.201.04	Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	-	8 dok	7 dok	87,50	8 dok
4.02.002.201.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	1 dok	1 dok	-	-	1 dok
4.02.002.202	Pembahasan Kebijakan Anggaran					
4.02.002.202.01	Pembahasan KUA dan PPAS	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.202.02	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.202.03	Pembahasan APBD	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.202.04	Pembahasan APBD Perubahan	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.202.05	Pembahasan Laporan Semester	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.202.06	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.203.01	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					



4.02.002.203.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Hukum	4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali
4.02.002.203.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali
4.02.002.203.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali
4.02.002.203.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali
4.02.002.203.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	-	-	-	4 kali
4.02.002.204	Peningkatan Kapasitas DPRD					
4.02.002.204.02	Bimbingan Teknis DPRD	6 kali	6 kali	5 kali	83,33	6 kali
4.02.002.204.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	114 kali	110 kali	106 kali	96,36	12 bulan
4.02.002.204.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
4.02.002.204.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	90 kali	100 kali	91 kali	91,00	100 kali
4.02.002.204.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok
4.02.002.205	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					
4.02.002.205.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	-	50 orang	0 orang	-	3 kali
4.02.002.205.02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	-	100 dok	-	-	100 dok
4.02.002.205.03	Pelaksanaan Reses	2 kali	3 kali	3 kali	100	3 kali
4.02.002.206	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					
4.02.002.206.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	1 dok	1	-	-	1 dok
4.02.002.208	Fasilitas Tugas DPRD					
4.02.002.208.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	77 kali	95 kali	91 kali	95,79	95 kali
4.02.002.208.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1 dok	1 dok	-	-	1 dok

Dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dengan realisasi seperti pada tabel 2.1. tentunya banyak penyebab, kendala, hambatan ketidak berhasilan tercapainya program dan kegiatan maupun pendukung, pendorong dan penunjang tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 2.6.
Faktor-faktor Tidak Tercapainya/Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja

No.	Faktor-faktor Penyebab	Tidak Tercapai Target	Terpenuhi Target	Melebihi Target
1.	Perencanaan dan anggaran	Belum Optimal	Optimal	Optimal
2.	Sumberdaya Aparatur	Kurangnya Kualitas Aparatur,	Meningkatnya Kualitas Aparatur,	Meningkatnya Kualitas Aparatur,



		Kurangnya Disiplin	Meningkatnya Disiplin	Meningkatnya Disiplin
3.	Sarana dan Prasarana	Belum Maksimal	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Peningkatan Sarana dan Prasarana
4.	Pendidikan dan Pelatihan	Kurangnya Bintek	Peningkatan Bintek	Peningkatan Bintek
5.	Pendidikan Formal (Bidang Hukum, Komputer, Akuntansi)	Kurang/Tidak Sesuai Bidang	Sesuai Bidang	Peningkatan Aparatur Sesuai Bidang
6.	Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Belum Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal
7.	Monitoring dan Evaluasi	Kurangnya Monitoring dan Evaluasi	Berjalannya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Peningkatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Dari tabel 2.6 diatas terutama faktor-faktor penyebab tidak tercapainya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tentunya akan menimbulkan implikasi terhadap pencapaian program renstra antara lain :

1. Faktor perencanaan dan anggaran berimplikasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak tepat waktu dan tidak terserapnya sebagian atau seluruh anggaran yang direncanakan.
2. Faktor sumberdaya aparatur berimplikasi pada kurang optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan disebabkan minimnya kualitas aparatur terhadap pemahaman pelaksanaan program dan kegiatan, kurangnya disiplin mengakibatkan minimnya rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Faktor sarana dan prasarana berimplikasi pada kurang optimalnya dalam peningkatan kinerja aparatur baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan maupun pada pelaksanaan kinerja sesuai tupoksinya.
4. Faktor pendidikan dan pelatihan formal berimplikasi pada kurang pemahaman dan profesionalisme aparatur terhadap pelaksanaan kinerja baik program dan kegiatan serta kurangnya bintek menyebabkan ketrampilan dan kemampuan tidak ada peningkatan.
5. Faktor pendidikan formal berimplikasi pada kurang profesionalisme dibidangnya, kurangnya pemahaman diakibatkan tidak sesuainya kinerja aparatur dengan latar belakang pendidikan.
6. Faktor pelaksanaan program dan kegiatan berimplikasi pada belum sesuainya jadwal berakibat target pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana, kemungkinan terjadi pengurangan anggaran ataupun tidak terserapnya anggaran.

Mencermati hal itu serta untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut agar tidak menjadi kendala dan permasalahan serta meminimalisir faktor penyebab, Sekretariat DPRD berusaha melakukan kebijakan perencanaan dan penganggaran sebagai berikut :



1. Peningkatan perencanaan program dan kegiatan secara menyeluruh pada setiap bagian lingkup Sekretariat DPRD.
2. Mencermati pengelolaan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.
3. Peningkatan program dan kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu sesuai rencana yang ditetapkan.
4. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar bagian lingkup Sekretariat DPRD maupun dengan instansi/badan/lembaga terkait lainnya.
5. Peningkatan profesionalisme sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan maupun sesuai dengan latar belakang pendidikan (Hukum, Akuntansi, Komputer dan lainnya).
6. Peningkatan penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
7. Peningkatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Mengacu pada realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan, pencapaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan indikator kinerja yang seluruh program dan kegiatan baik program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang memang langsung memfasilitasi fungsi, tugas dan wewenang DPRD telah dilaksanakan dengan indikator sebagai berikut :

2.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator : Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator : Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Indikator : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan.

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN



Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Indikator : Tersusunnya keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Pegawai Yang difasilitasi.

Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

Indikator : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Indikator : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor .

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Indikator : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Indikator : Tersedianya peralatan rumah tangga

Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Indikator : Tersedianya barang cetak dan penggandaan.

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

Indikator : Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu.

Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Indikator : Terselenggaranya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum.

Indikator : Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah.



Sub kegiatan Pengadaan Mebel.

Indikator : Tersedianya mebel

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator : Tersedianya Jasa Penunjang

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Indikator : Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan.

Indikator : Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.

Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel

Indikator : Terlaksananya pemeliharaan mebel.

Sub kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator : Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya

Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Indikator : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya.

h. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Indikator : Terlaksananya Layanan Gaji dan Tunjangan DPRD.

Sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.

Indikator : Tersedianya hak keuangan DPRD.



Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

Indikator : Terlaksananya medical check up DPRD

i. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD.

Indikator : Tersedianya Rapat dan Konsultasi DPRD.

Sub kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.

Indikator : Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD.

2.2.2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Indikator : Terlaksananya Pembahasan dan Pembentukan Raperda.

Sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Indikator : Terlaksananya penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah.

Sub kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Indikator : Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah.

Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Indikator : Terlaksananya fasilitasi penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Sub kegiatan Penyusunan Tata Tertib

Indikator : Tersusunnya tata tertib DPRD.

b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.

Indikator : Terlaksananya Pembahasan dan Penetapan Rencana Anggaran

Sub kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS.

Indikator : Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS

Sub kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS.

Indikator : Terlaksananya pembahasan perubahan KUA dan PPAS

Sub kegiatan Pembahasan APBD.

Indikator : Terlaksananya pembahasan APBD

Sub kegiatan Pembahasan APBD Perubahan.

Indikator : Terlaksananya pembahasan APBD perubahan

Sub kegiatan Pembahasan Laporan Semesteran



- Indikator : Terlaksananya hasil pembahasan realisasi peralaksana APBD per semester.
Sub kegiatan Pembahasan Pertanggung jawaban APBD.
Indikator : Terlaksananya pembahasana pertanggung jawaban APBD
- c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Indikator : Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan.
Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dna Hukum.
Indikator : Terlaksananya pengawasan urusan bidang pemerintahan dan hukum
Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
Indikator : Terlaksananya pengawasan urusan bidang infrastruktur.
Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Indikator : Terlaksananya pengawasan urusan bidang kesejahteraan rakyat.
Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
Indikator : Terlaksananya pengawasan urusan bidang perekonomian.
Sub kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Indikator : Terlaksananya pengawasan tindak lanjut pemeriksaan keuangan oleh BPK.
- d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
Indikator : Terlaksananya Pemenuhan Fasilitas Kapasitas DPRD.
Sub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD
Indikator : Terlaksananya pendalaman tugas DPRD.
Sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
Indikator : Terlaksananya penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dokumentasi dewan.
Sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli.
Indikator : Tersedianya kelompok pakar dan tim ahli.
Sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
Indikator : Tersedianya tenaga ahli fraksi.
Sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.
Indikator : Terselenggaranya hubungan masyarakat
Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
Indikator : Tersusunnya rencana kerja DPRD.
- e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Indikator : Jumlah Laporan Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.
Sub kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
Indikator : Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD
Sub kegiatan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD
Indikator : Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD



Sub kegiatan Pelaksanaan Reses.

Indikator : Terlaksananya reses.

f. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik.

Indikator : Terlaksananya Pelaksanaan Kode Etik DPRD

Sub kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD.

Indikator : Tersusunnya kode etik dan tata beracara DPRD.

g. Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah.

Indikator : Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi.

Sub kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.

Indikator : Tersusunnya bahan komunikasi dan publikasi.

h. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Indikator : Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD

Sub kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Indikator : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Indikator : Tersusunnya laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD.

Indikator tersebut diatas adalah indikator Renstra Tahun 2019-2023 yang mengacu RJPMD Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD merupakan program dan kegiatan yang didalam terdapat program prioritas yaitu Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD salah satu kegiatannya adalah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, seluruh pencapaian indikator kegiatan dan sub kegiatan seperti tabel berikut :



Tabel 2.7.--
Pencapaian Kinerja Program Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Tangerang

No.	Indikator	Indikator Kinerja, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kesesuaian sasaran/program dalam Renja OPD terhadap RKPd dan Renstra OPD terhadap RPJMD													
1.	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja SKPD													
		Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan	Dok	7	6	7	7	7	7	6	7	-	-	-	
		Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dok	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen laporan keuangan													
		Tersedianya pemenuhan gaji ASN	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	
		Tersedianya dokumen laporan keuangan	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1				
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pegawai													
		Tersedianya pakaian dinas beserta atirbutnya	Stel	350	350	300	300	300	350	350	300				
		Jumlah pegawai yang terfasilitasi Bimtek	Orang	50	32	50	50	50	50	32	50				
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana penunjang kantor													
		Tersedianya komponen penerangan kantor	Jenis	5	5	1	1	1	5	5	1				
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Item	6	7	7	7	7	6	7	5				
		Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis	16	16	7	7	7	16	16	5				
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jenis	4	4	3	3	3	4	4	3				



Sekretariat DPRD

	Tersedianya bahan bacaan	Jenis	4	4	4	4	4	4	4	4				
	Terfasilitasinya jamuan makan tamu	Dus	1969	12100	5000	5000	5000	1948	8695	4061				
	Tersedianya laporan kunjungan kerja	Dok	100	140	85	85	90	100	123	85				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya mebel												
	Terlaksananya pengadaan mebel	Item	2	1	3	3	3	2	1	1				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa komunikasi												
	Tersedianya jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Unit	9	9	10	10	10	9	9	10				
	Terlaksananya petugas kebersihan kantor	Orang	16	16	16	16	16	16	16	16				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pegawai												
	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	item	57	58	4	4	4	57	58	4				
	Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jenis	5	5	3	3	3	5	5	3				
	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	Item	7	17	15	15	15	7	17	10				
	Terlaksananya pemeliharaan gedung	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Terlaksananya pemeliharaan/rehab sarana prasarana gedung kantor	Unit	-	-	1	1	1	-	-	1				
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pemenuhan administrasi keuangan DPRD												
	Tersedianya gaji DPRD	Orang atau bulan	50	50	50	12	12	50	50	50				
	Terlaksananya medical check up	Orang	50	50	50	50	50	38	2	16				
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan rapat-rapat DPRD												
	Terfasilitasinya rapat-rapat DPRD	Kali	41	41	95	95	95	41	41	85				
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan tugas dan fungsi DPRD												
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pembentukan peraturan daerah												



Sekretariat DPRD

	Terlaksana pembahasan pra raperda	Keg	-	-	5	2	5	-	-	4				
	Tersedianya raperda	Perda	10	11	12	13	14	14	8	8				
	Tersedianya naskah akademik draf raperda	Dok	-	-	8	8	8	-	-	7				
	Tersedianya tata tertib	Dok	1	1	1	1	1	1	-	-				
	Pembahasan Kebijakan Anggaran													
	Persentase pemenuhan pembahasan anggaran													
	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS perubahan	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Terlaksananya pembahasan APBD	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Terlaksananya pembahasan APBD perubahan	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Terlaksananya pembahasan laporan semesteran	Kali	1	1	1	2	1	1	1	1				
	Terlaksananya pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan													
	Persentase pemenuhan pengawasan pemerintahan													
	Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	Kali	4	4	4	4	4	4	4	3				
	Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	Kali	4	4	4	4	4	4	4	3				
	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	Kali	4	4	4	4	4	4	4	3				
	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian	Kali	4	4	4	4	4	4	4	3				
	Terlaksananya pengawasan tindaklanjut pemeriksaan laporan keuangan	Kali	-	-	4	4	4	-	-	3				
	Peningkatan Kapasitas DPRD													
	Persentase pemenuhan kapasitas DPRD													
	Terlaksananya bimtek Dewan	Kali	6	6	6	6	6	6	6	5				
	Terlaksananya publikasi dan dokumentasi	Kali dan Bulan	110	110	12	12	12	102	104	106				
	Terfasilitasinya kegiatan fraksi	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12				
	Jumlah fasilitasi hubungan masyarakat	Kali	10	100	100	100	100	90	100	91				



Sekretariat DPRD

		Tersedian program kerja DPRD	Dok	1	1	1	1	1							
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan Reses													
		Jumlah laporan kunjungan kerja	Lap atau kali	21	50	3	3	3	-	50	-				
		Terlaksananya penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Dok atau kali	-	-	3	3	3	-	-	-				
		Jumlah dokumen reses	Kali	3	3	3	3	3	2	2	3				
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pemenuhan dokumen kode etik													
		Tersedianya dokumen kode etik	Dok	1	1	1	1	1	1	-	-				
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi													
		Terlaksananya konferensi pers	Kali atau Bulan	72	60	12	12	12	51	34	12				
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pemenuhan koordinasi dan konsultasi DPRD													
		Jumlah koordinasi dan konsultasi DPRD	Kali	85	85	85	85	90	77	85	85				
		Tersedianya dokumen laporan kinerja DPRD	Dok	1	1	1	1	1	1	-	-				



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang serta Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang, secara organisatoris dan manajerial Sekretariat DPRD merupakan fasilitator yang menopang seluruh tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan DPRD baik bersifat rutinitas maupun terdapat dalam program dan kegiatan yang telah rencanakan.

Fasilitasi yang diberikan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dilakukan mengacu pada pelayanan prima yaitu pelayanan terbaik dengan memperhatikan kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan DPRD sehingga capaian kinerja dengan hasil memuaskan.

Pelayanan prima merupakan pelayanan yang berdimensi pada ketepatan waktu, kelayakan pelayanan, keramahan dan kesopanan, pelayanan yang cepat, pelayanan terhadap informasi, profesionalisme SDM dan pelayanan terkait dengan kondisi dan lingkungan tempat aktivitas akan dilaksanakan.

Sekretariat DPRD sebagai fasilitator menyadari sepenuhnya akan hal tersebut, semua dimensi telah diupayakan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD dengan segala kemampuan yang ada. Namun demikian dalam rentang pelaksanaan fasilitasi terhadap DPRD terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang mengganggu jalan fasilitasi walaupun secara keseluruhan tidak mengganggu pelaksanaan kinerja DPRD.

Beberapa isu-isu penting atau permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam melakukan fasilitasi terhadap DPRD antara lain :

1. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran disetiap bagian.
2. Belum optimalnya koordinasi baik dengan DPRD, antar bagian maupun dengan instansi/dinas/lembaga lainnya.
3. Kurangnya komunikasi yang berkelanjutan antara DPRD, antar bagian maupun dengan instansi/dinas/lembaga terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
4. Perlu adanya perbaikan dan peningkatan profesionalisme aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
5. Minimnya SDM yang sesuai dengan bidang pendidikan (Hukum, Akuntansi, Komputer, Kearsipan dan lain-lain).



6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap semua aspek yang menunjang kinerja DPRD.
7. Sebagai organisasi yang memfasilitasi kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD menyadari bahwa tanggungjawab keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD merupakan implementasi dari harapan dan keinginan masyarakat luas serta bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian untuk dapat melakukan fasilitasi terhadap DPRD tersebut agar berjalan sesuai dengan harapan terdapat tantangan yang dihadapi oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD antara lain :
 1. Pada aspek perencanaan dan anggaran, perlu adanya kematangan dalam rencana anggaran maupun rencana pelaksanaan kegiatan.
 2. Pada aspek koordinasi, perlu adanya kesinambungan dan kemampuan aparatur dalam melakukan koordinasi.
 3. Pada aspek komunikasi, diperlukan peningkatan kemampuan komunikasi aparatur pada semua bidang.
 4. Pada aspek SDM, diperlukan peningkatan profesionalisme dari segi kualitas maupun kuantitas.
 5. Pada aspek profesionalisme, adanya penempatan pegawai sesuai dengan bidang pendidikan yang dimiliki.
 6. Pada aspek monitoring dan evaluasi, optimalisasi monitoring dan evaluasi terhadap check and recheck serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal antara lain sebagaimana diatas, Sekretariat DPRD berupaya membuat suatu rekomendasi dan catatan untuk ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD yaitu fasilitasi program dan kegiatan terhadap DPRD sesuai tugas, fungsi dan kewenangan agar melalui perencanaan dan penganggaran yang akurat, tepat dan cepat, meningkatkan koordinasi dan komunikasi, peningkatan profesionalisme aparatur melalui pendidikan formal maupun non formal, peningkatan monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan serta membuat laporan yang akuntabel dan transparan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan pagu indikatif KUA PPAS Tahun 2022 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, Sekretariat DPRD untuk Tahun 2023 mendapat alokasi anggaran pagu indikatif sebesar Rp. 125.046.263.572,- yang dialokasikan untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sebesar Rp. 73.383.611.572,-.



Dan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar sebesar Rp. 51.662.652.000,-

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Tahun 2022 Sekretariat DPRD melaksanakan 2 program, 17 kegiatan dan 51 sub kegiatan sedangkan Tahun 2023 DPRD melaksanakan 2 program, 17 Kegiatan dan 60 sub kegiatan yaitu :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini meliputi 9 kegiatan dengan 29 sub kegiatan hasil koordinasi dan pemetaan bersama dengan Bappeda. Kegiatan dan sub kegiatan tersebut sudah mulai dilaksanakan pada Tahun 2021. Alokasi anggaran untuk 9 kegiatan dan 24 sub kegiatan sebesar Rp. 73.383.611.572,- namun demikian anggaran tersebut secara keseluruhan belum menunjang terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, diperkirakan akan bertambah pada saat perubahan anggaran.

2. Program Dan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Program ini meliputi 8 kegiatan dengan 31 sub kegiatan merupakan program program yang langsung memfasilitasi kegiatan DPRD. Alokasi anggaran untuk 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan sebesar Rp. 51.662.652.000,- anggaran tersebut secara keseluruhan belum menopang terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, diperkirakan akan bertambah pada saat perubahan anggaran.

Mengacu pada hasil reuiu Bappeda dan memperhatikan tugas dan fungsi serta aktivitas kegiatan dewan yang memerlukan alokasi anggaran yang berbeda dari OPD lain. maka Sekretariat DPRD mendapat alokasi anggaran yang sudah tercantum dalam SIPD sebesar Rp. 125.046.263.572,- merupakan indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Tahun 2023. Review sebagaimana paparan diatas sudah merujuk pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Permendagri 050-5889 Tahun 2021.

Terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019 diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang berlaku secara nasional menghendaki adanya perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan permendagri tersebut dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan



Daerah atau SIPD yang dirancang oleh Kemendagri. Penerapan SIPD dimaksud harus sudah berjalan pada Tahun 2023 secara nasional dengan penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan oleh Kemendagri untuk seluruh pemerintah daerah termasuk untuk OPD yang ada di daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang sebagai salah satu perangkat daerah pada Tahun 2023 telah berkoordinasi secara intensif dengan OPD terkait dalam hal ini dengan Bappeda dan Organisasi untuk memetakan dan menetapkan kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 serta disesuaikan dengan kebutuhan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD. Mengacu Permendagri serta memperhatikan hasil pemetaan kegiatan dan sub kegiatan, Sekretariat DPRD mengelola 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 9 kegiatan dialokasikan pada 29 sub kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 8 kegiatan dialokasikan pada 3 sub kegiatan.

Agar semua program, kegiatan dan sub kegiatan diperlukan adanya anggaran guna menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan pagu indikatif dari TAPD atau Bappeda untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 125.046.263.572,- dialokasikan untuk program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 73.383.611.572,- dan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 51.662.652.000,-.

Estimasi rincian anggaran tersebut sesuai kebutuhan untuk 2 program, 17 kegiatan dan 60 sub kegiatan dapat dilihat seperti pada tabel :



Tabel 2.8.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
 Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang
 Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kesesuaian sasaran/program dalam Renja OPD terhadap RKPD dan Renstra OPD terhadap RPJMD		73.383.611.572	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kesesuaian sasaran/program dalam Renja OPD terhadap RKPD dan Renstra OPD terhadap RPJMD		72.905.779.576	
	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja SKPD		135.927.500	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja SKPD		143.985.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	64.477.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	64.979.500	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	18.745.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	20.650.000	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1 Dokumen	11.070.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dan		Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1 dokumen	15.495.000	



			dokumen perubahan RKA-SKPD			laporan hasil koordinasi penyusunan		dokumen perubahan RKA-SKPD			
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	19.945.000	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	20.650.000	
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD		Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	11.520.000	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD		Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	13.016.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	10.170.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	9.195.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen laporan keuangan		11.176.124.136	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen laporan keuangan		11.058.360.440	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya pemenuhan gaji ASN	1 dokumen	11.167.529.136	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya pemenuhan gaji ASN	1 dokumen	11.049.619.940	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersusunnya keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	8.595.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersusunnya keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	8.740.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/Semesteran SKPD		Tersusunnya keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/Semesteran SKPD		Tersedianya dokumen laporan keuangan	1 dokumen	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi pegawai		517.548.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi pegawai		517.548.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya	70 stel	150.948.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya	70 stel	150.948.000	



	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	52 orang	366.600.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang terfasilitasi Bimtek	52 orang	366.600.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tersedianya sarana penunjang kantor		12.783.317.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tersedianya sarana penunjang kantor		13.103.408.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen penerangan kantor	1 jenis	75.007.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen penerangan kantor	1 jenis	75.007.400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	526.091.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	510.055.600	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya peralatan rumah tangga	7 jenis	252.046.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya peralatan rumah tangga	7 jenis	508.622.100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 jenis	250.071.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 jenis	250.071.900	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan	4 jenis	150.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan	4 jenis	230.000.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Terfasilitasinya jamuan makan tamu	5000 dus	894.750.000	Fasilitas Kunjungan Tamu		Terfasilitasinya jamuan makan tamu	5000 dus	894.800.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya laporan kunjungan kerja	88 kali	10.634.850.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya laporan kunjungan kerja	88 kali	10.634.851.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tersedianya mebel		96.291.700	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tersedianya mebel		98.140.000	
	Pengadaan Mebel		Tersedianya mebel	5 unit	96.291.700	Pengadaan Mebel		Tersedianya mebel	5 unit	98.140.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan jasa komunikasi		545.700.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan jasa komunikasi		545.783.200	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	60.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	60.000.000	



	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	12 bulan	485.700.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	12 bulan	485.783.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pegawai		1.661.043.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pegawai		1.752.921.700	
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 item	734.442.000	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 item	827.766.000	
	Pemeliharaan Mebel		Terlaksananya pemeliharaan mebel	5 unit	56.000.000	Pemeliharaan Mebel		Terlaksananya pemeliharaan mebel	5 unit	56.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	15 item	143.310.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	15 item	143.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	1 unit	477.503.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	1 unit	477.503.600	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	25 unit	249.788.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	25 unit	248.152.100	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase pemenuhan administrasi keuangan DPRD		44.510.323.536	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase pemenuhan administrasi keuangan DPRD		43.977.382.736	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Tersedianya hak keuangan DPRD	50 orang	42.933.342.736	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Tersedianya gaji DPRD	50 orang	42.933.342.736	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Tersedianya pakaian dinas dan atribut DPRD	200 paket	1.398.215.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Tersedianya pakaian dinas dan atribut DPRD	200 paket	865.290.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Terlaksananya medical check up	50 orang	178.765.800	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Terlaksananya medical check up	50 orang	178.750.000	
	Layanan Administrasi DPRD		Persentase pemenuhan rapat-rapat DPRD		1.957.336.000	Layanan Administrasi DPRD		Persentase pemenuhan rapat-rapat DPRD		1.708.250.000	



Sekretariat DPRD

	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	95 kali	1.957.336.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	95 kali	1.708.250.000	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase pemenuhan tugas dan fungsi DPRD		51.662.652.000	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase pemenuhan tugas dan fungsi DPRD		62.140.483.996	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase pembentukan peraturan daerah		3.718.852.500	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase pembentukan peraturan daerah		3.520.284.300	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Terlaksananya penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	2 kegiatan	454.369.400	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Terlaksananya penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	2 kegiatan	464.049.200	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Terlaksananya pembahasan rancangan perda	16 perda	2.519.882.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Terlaksananya pembahasan rancangan perda	16 perda	2.305.634.000	
	Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Terlaksananya fasilitasi penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik	8 dokumen	710.743.000	Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Terlaksananya fasilitasi penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik	8 dokumen	716.743.000	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Tersusunnya tata tertib DPRD	1 dokumen	33.858.100	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Tersusunnya tata tertib DPRD	1 dokumen	33.858.100	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase pemenuhan pembahasan anggaran		979.272.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase pemenuhan pembahasan anggaran		975.838.080	
	Pembahasan KUA dan PPAS		Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1 kali	156.702.400	Pembahasan KUA dan PPAS		Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1 kali	155.769.520	
	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS		Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS perubahan	1 kali	156.702.400	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS		Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS perubahan	1 kali	155.769.520	
	Pembahasan APBD		Terlaksananya pembahasan APBD	1 kali	156.702.400	Pembahasan APBD		Terlaksananya pembahasan APBD	1 kali	155.769.520	
	Pembahasan APBD Perubahan		Terlaksananya pembahasan APBD perubahan	1 kali	156.702.400	Pembahasan APBD Perubahan		Terlaksananya pembahasan APBD perubahan	1 kali	155.769.520	
	Pembahasan Laporan Semester		Terlaksananya pembahasan laporan semesteran	2 kali	76.060,000	Pembahasan Laporan Semester		Terlaksananya pembahasan laporan semesteran	2 kali	76.940.000	



	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD		Terlaksananya pembahasan pertanggungjawana APBD	1 kali	276.402.400	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD		Terlaksananya pembahasan pertanggungjawana APBD	1 kali	275.820.000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase pemenuhan pengawasan pemerintahan		1.434.756.000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase pemenuhan pengawasan pemerintahan		1.385.612.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Terlaksananya pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintahan dan hukum	4 kali	332.592.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	4 kali	245.922.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Terlaksananya pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur	4 kali	323.016.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	4 kali	253.104.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Terlaksananya pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	4 kali	323.016.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	4 kali	232.740.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Terlaksananya pengawasan urusan pemerintah bidang perekonomian	4 kali	332.592.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian	4 kali	260.286.000	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Terlaksananya pengawasan tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	2 kali	123.540.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Terlaksananya pengawasan tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	2 kali	117.740.000	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah		Terlaksananya pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	1 kali	275.820.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah		Terlaksananya pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	1 kali	275.820.000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase pemenuhan kapasitas DPRD		9.033.934.600	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase pemenuhan kapasitas DPRD		8.726.154.600	
	Pendalaman Tugas DPRD		Terlaksananya pendalaman tugas DPRD	6 kali	1.635.000.000	Bimbingan Teknis DPRD		Terlaksananya pendalaman tugas DPRD	6 kali	1.615.000.000	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Tersedianya penyebaran produk hukum, daerah publikasi dan dokumentasi dewan	12 bulan	2.124.680.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Tersedianya penyebaran produk hukum, daerah publikasi dan dokumentasi dewan	12 bulan	1.836.900.000	



	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Tersedianya kelompok pakar dan tim ahli	3 orang	370.600.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Tersedianya kelompok pakar dan tim ahli	3 orang	370.600.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Tersedianya tenaga ahli fraksi	12 bulan	792.240.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Tersedianya tenaga ahli fraksi	12 bulan	792.240.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Terselenggaranya hubungan masyarakat	100 kali	4.053.516.600	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Terselenggaranya hubungan masyarakat	100 kali	4.053.516.600	
	Penyusunan Program Kerja DPRD		Tersusunnya rencana kerja DPRD	1 dokumen	57.898.000	Penyusunan Program Kerja DPRD		Tersusunnya rencana kerja DPRD	1 dokumen	57.898.000	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase pelaksanaan Reses		8.660.200.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase pelaksanaan Reses		8.665.547.120	
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah		Jumlah laporan hasil kunjungan kerja	3 kali	631.425.000	Kunjungan Kerja Dalam Daerah		Jumlah laporan hasil kunjungan kerja	3 kali	643.089.000	
	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD		Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD	3 kali	56.005.000	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD		Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD	3 kali	62.199.320	
	Pelaksanaan Reses		Terlaksananya reses	3 kali	7.972.770.000	Pelaksanaan Reses		Terlaksananya reses	3 kali	7.960.258.800	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase pemenuhan dokumen kode etik		28.124.500	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase pemenuhan dokumen kode etik		28.123.100	
	Penyusunan Kode Etik DPRD		Tersusunnya kode etik dan tata beracara	1 dokumen	28.124.500	Penyusunan Kode Etik DPRD		Tersusunnya kode etik dan tata beracara	1 dokumen	28.123.100	
	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi		199.980.000	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi		199.980.000	
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		Tersusunnya bahan komunikasi dan publikasi	12 bulan	199.980.000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		Tersusunnya bahan komunikasi dan publikasi	12 bulan	199.980.000	
	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase pemenuhan koordinasi dan konsultasi DPRD		28.036.030.400	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase pemenuhan koordinasi dan konsultasi DPRD		33.639.921.396	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	95 kali	27.995.488.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	95 kali	33.165.387.146	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Tersusunnya laporan fraksi, alat kelengkapan kinerja DPRD	1 dokumen	40.542.400	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Tersusunnya laporan fraksi, alat kelengkapan kinerja DPRD	1 dokumen	63.690.000	



Sekretariat DPRD

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan badan musyawarah	48 kali/ dokumen	122.640.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan badan musyawarah	48 kali/ dokumen	122.640.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	2 kali/ dokumen	288.204.250	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	2 kali/ dokumen	288.204.250	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang sebagai fasilitator berbagai kegiatan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya melalui Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang diubah dengan Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 telah memetakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 yang memfasilitasi aktivitas dewan baik yang berkaitan langsung dengan kepentingan dewan maupun kegiatan penunjang guna kelancaran dan keberhasilan tugas dan fungsi DPRD.

Pada Tahun 2023 Sekretariat DPRD direncanakan akan mengelola program dan kegiatan terdiri atas 2 program, 19 Kegiatan dan 51 sub kegiatan. Dengan demikian Tahun 2023 Sekretariat DPRD tidak menampung serta mengelola kegiatan yang berasal maupun atas usulan pemangku kepentingan, kelompok masyarakat terkait langsung pelayanan provinsi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi atau dari stakeholder lainnya.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggungjawab lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta mengembangkan mekanisme check and balance antara DPRD dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja anggota DPRD demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas. Mekanisme check and balance dilandasi pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagai cerminan representatif lembaga perwakilan rakyat.

DPRD dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah yang menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat.

Atas dasar hal itu guna meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dalam mewujudkan peran DPRD dalam menjalankan check and balance terhadap kebijakan pemerintah daerah, Sekretariat DPRD seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan fasilitator dalam upaya menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD dalam menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan untuk mencapai kinerja yang maksimal sebagai pengemban amanah rakyat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Memperhatikan hal tersebut diatas serta berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023 yang telah ditetapkan, bahwa Sekretariat DPRD selama kurun waktu 5 tahun kedepan telah menetapkan 3 tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja Fasilitasi Sekretariat DPRD melalui profesionalisme Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.
2. Peningkatan hasil laporan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD yang akuntabel.
3. Meningkatkan produk hukum daerah yang dihasilkan DPRD.
4. Penyelenggaraan pengawasan dan penganggaran pemerintah daerah.



Dari 3 tujuan tersebut ditetapkan 3 sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tangerang.
2. Mendorong perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.
4. Peningkatan Pengawasan dan Penganggaran Pemerintah Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 merupakan implementasi dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2019–2023. Program-program yang disusun dalam Rencana Kerja ini merupakan penerapan dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Permendagri Nomor 050 Tahun 2020 yang diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Perpres 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang sebagai upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan.

Dengan tetap berpedoman kepada Rencana Strategis organisasi yang telah disepakati, maka untuk Tahun Anggaran 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang berpedoman pada Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 menetapkan 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 9 kegiatan yang meliputi 29 sub kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 8 kegiatan yang meliputi 31 sub kegiatan sebagai berikut :

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas dari 9 kegiatan dengan 29 sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, diarahkan pada sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.



- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :
 - Pengadaan Mebel.
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Pemeliharaan Mebel.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.



8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :
 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.
9. Layanan Administrasi DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :
 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.
- ❖ Program Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD, terdiri atas dari 8 kegiatan dengan 31 sub kegiatan, sebagai berikut :
 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :
 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
 - Penyusunan Tata Tertib DPRD.
 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran, diarahkan pada sub kegiatan :
 - Pembahasan KUA dan PPAS.
 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
 - Pembahasan APBD.
 - Pembahasan APBD Perubahan.
 - Pembahasan Laporan Semester.
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, diarahkan pada sub kegiatan :
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum.
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur.
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian.
 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
 4. Peningkatan Kapasitas DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :
 - Pendalaman Tugas DPRD.
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan.
 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli.
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.



- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.
 - Penyusunan Program Kerja DPRD.
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, diarahkan pada sub kegiatan :
- Kunjungan Kerja dalam Daerah.
 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
 - Pelaksanaan Reses.
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :
- Penyusunan Kode Etik DPRD.
7. Pembahasan Kerja Sama Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :
- Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi,
8. Fasilitasi Tugas DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
 - Penyusunan Laporan Kinerja.
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus.

Program dan kegiatan seperti tercantum diatas merupakan estimasi kegiatan untuk Tahun 2023 yang mengacu pada Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Program, kegiatan dan sub kegiatan dimungkinkan akan mengalami perubahan apabila dirasa dapat mengakomodir fasilitasi kegiatan DPRD dan disesuaikan dengan kebutuhan Sekretariat DPRD. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dan perkiraan maju Tahun 2024 dapat dilihat seperti tabel berikut :



Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatang Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian sasaran/program dalam Renja OPD terhadap RKPD dan Renstra OPD terhadap RPJMD	Setwan	85,96 %	73.383.611.572	APBD		85,96 %	72.905.779.576
1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja SKPD	Setwan	90,45 %	135.927.500	APBD		90,45 %	143.985.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Setwan	3 dokumen	64.477.500	APBD		3 dokumen	64.979.500
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Setwan	1 dokumen	18.745.000	APBD		1 dokumen	20.650.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Setwan	1 Dokumen	11.070.000	APBD		1 Dokumen	15.495.000
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Setwan	1 dokumen	19.945.000	APBD		1 dokumen	20.650.000
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen	Setwan	1 dokumen	11.520.000	APBD		1 dokumen	13.016.000



					perubahan DPA-SKPD								
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Setwan	1 dokumen	10.170.000	APBD		1 dokumen	9.195.000
		2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen laporan keuangan	Setwan	91,30%	11.176.124.136	APBD		91,30%	11.058.360.440
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya pemenuhan gaji ASN	Setwan	1 dokumen	11.167.529.136	APBD		1 dokumen	11.049.619.940
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Setwan	1 dokumen	8.595.000	APBD		1 dokumen	8.740.500
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan	Setwan	1 dokumen	8.050.000	APBD		1 dokumen	8.050.000
		3			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pegawai	Setwan	92,20%	517.548.000	APBD		92,20%	517.548.000
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya	Setwan	70 stel	150.948.000	APBD		70 stel	150.948.000
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Setwan	52 orang	366.600.000	APBD		52 orang	366.600.000
		4			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana penunjang kantor	Setwan	90,10%	12.783.317.100	APBD		90,10%	13.103.408.000
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen penerangan kantor	Setwan	1 jenis	75.007.400	APBD		1 jenis	75.007.400
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Setwan	7 jenis	526.091.700	APBD		7 jenis	510.055.600
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Setwan	7 jenis	252.046.000	APBD		7 jenis	508.622.100
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Setwan	3 jenis	250.071.400	APBD		3 jenis	250.071.900
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Setwan	4 jenis	150.500.000	APBD		4 jenis	230.000.000
					Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya jamuan makan tamu	Setwan	5000 dus	894.750.000	APBD		5000 dus	894.800.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya laporan kunjungan kerja	Setwan	88 kali	10.634.850.600	APBD		88 kali	10.634.851.000



		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya mebel	Setwan	77,60%	96.291.700	APBD		77,60%	98.140.000
			Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Setwan	5 unit	96.291.700	APBD		5 unit	98.140.000
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa komunikasi	Setwan	78,15%	545.700.000	APBD		78,15%	545.783.200
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Setwan	12 bulan	60.000.000	APBD		12 bulan	60.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Setwan	12 bulan	485.700.000	APBD		12 bulan	485.783.200
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pegawai	Setwan	90,00%	1.661.043.600	APBD		90,00%	1.752.921.700
			Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Setwan	4 item	734.442.000	APBD		4 item	827.766.000
			Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel	Setwan	5 unit	56.000.000	APBD		5 unit	56.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	Setwan	15 item	143.310.000	APBD		15 item	143.500.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	Setwan	1 unit	477.503.600	APBD		1 unit	477.503.600
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Setwan	25 unit	249.788.000	APBD		25 unit	248.152.100
		8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pemenuhan administrasi keuangan DPRD	Setwan	71,95%	44.510.323.536	APBD		71,95%	43.977.382.736
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya hak keuangan DPRD	Setwan	50 orang	42.933.342.736	APBD		50 orang	42.933.342.736
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian dinas dan atribut DPRD	Setwan	200 paket	1.398.215.000	APBD		200 paket	865.290.000
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya medical check up	Setwan	50 orang	178.765.800	APBD		50 orang	178.750.000
		9	Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan rapat-rapat DPRD	Setwan	88,00%	1.957.336.000	APBD		88,00%	1.708.250.000
			Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Setwan	95 kali	1.957.336.000	APBD		95 kali	1.708.250.000



			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan tugas dan fungsi DPRD	Setwan	82,37%	51.662.652.000	APBD		82,37%	57.140.483.996
		10	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Pembahasan dan pembentukan Raperda	Setwan	74,60%	3.718.852.500	APBD		74,60%	3.520.284.300
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Setwan	2 kegiatan	454.369.400	APBD		2 kegiatan	464.049.200
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya pembahasan rancangan perda	Setwan	16 perda	2.519.882.000	APBD		16 perda	2.305.634.000
			Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Terlaksananya fasilitasi penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik	Setwan	8 dokumen	710.743.000	APBD		8 dokumen	716.743.000
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya tata tertib DPRD	Setwan	1 dokumen	33.858.100	APBD		1 dokumen	33.858.100
		11	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pemenuhan pembahasan anggaran	Setwan	90,00%	979.272.000	APBD		90,00%	975.838.080
			Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	Setwan	1 kali	156.702.400	APBD		1 kali	155.769.520
			Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS perubahan	Setwan	1 kali	156.702.400	APBD		1 kali	155.769.520
			Pembahasan APBD	Terlaksananya pembahasan APBD	Setwan	1 kali	156.702.400	APBD		1 kali	155.769.520
			Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya pembahasan APBD perubahan	Setwan	1 kali	156.702.400	APBD		1 kali	155.769.520
			Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya pembahasan laporan semesteran	Setwan	2 kali	76.060.000	APBD		2 kali	76.940.000
			Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Terlaksananya pembahasan Pertanggungjawana APBD	Setwan	1 kali	276.402.400	APBD		1 kali	275.820.000
		12	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pemenuhan pengawasan pemerintahan	Setwan	91,65%	1.710.576.000	APBD		91,65%	1.385.612.000
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintahan dan hukum	Setwan	4 kali	332.592.000	APBD		4 kali	245.922.000
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur	Setwan	4 kali	323.016.000	APBD		4 kali	253.104.000



			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	Setwan	4 kali	323.016.000	APBD		4 kali	232.740.000
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintah bidang perekonomian	Setwan	4 kali	332.592.000	APBD		4 kali	260.286.000
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya pengawasan tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	Setwan	2 kali	123.540.000	APBD		2 kali	117.740.000
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah	Terlaksanakannya pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	Setwan	1 kali	275.820.000	APBD		1 kali	275.820.000
		13	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pemenuhan kapasitas DPRD	Setwan	90,00%	9.033.934.600	APBD		90,00%	8.726.154.600
			Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya pendalaman tugas DPRD	Setwan	6 kali	1.635.000.000	APBD		6 kali	1.615.000.000
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya penyebar luasan produk hukum, daerah publikasi dan dokumentasi dewan	Setwan	12 bulan	2.124.680.000	APBD		12 bulan	1.836.900.000
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya kelompok pakar dan tim ahli	Setwan	3 orang	370.600.000	APBD		3 orang	370.600.000
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya tenaga ahli fraksi	Setwan	12 bulan	792.240.000	APBD		12 bulan	792.240.000
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya hubungan masyarakat	Setwan	100 kali	4.053.516.600	APBD		100 kali	4.053.516.600
			Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya rencana kerja DPRD	Setwan	1 dokumen	57.898.000	APBD		1 dokumen	57.898.000
		14	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan Reses	Setwan	90,85%	8.660.200.000	APBD		90,85%	8.665.547.120
			Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja	Setwan	3 kali	631.425.000	APBD		3 kali	643.089.000
			Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD	Setwan	3 kali	56.005.000	APBD		3 kali	62.199.320
			Pelaksanaan Reses	Terlaksananya reses	Setwan	3 kali	7.972.770.000	APBD		3 kali	7.960.258.800
		15	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pemenuhan dokumen kode etik	Setwan	81,10%	28.123.100	APBD		81,10%	28.123.100
			Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya kode etik dan tata beracara	Setwan	1 dokumen	28.124.500	APBD		1 dokumen	28.123.100



		16	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi	Setwan	76,40%	199.980.000	APBD		76,40%	199.980.000
			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tersusunnya bahan komunikasi dan publikasi	Setwan	12 bulan	199.980.000	APBD		12 bulan	199.980.000
		17	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pemenuhan koordinasi dan konsultasi DPRD	Setwan	82,45%	28.446.874.650	APBD		82,45%	33.639.921.396
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Setwan	95 kali	27.995.488.000	APBD		95 kali	33.165.387.146
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya laporan fraksi, alat kelengkapan kinerja DPRD	Setwan	1 dokumen	40.542.400	APBD		1 dokumen	63.690.000
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan badan musyawarah	Setwan	48 kali/ dokumen	122.640.000	APBD		48 kali/ dokumen	122.640.000
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	Setwan	2 kali/ dokumen	288.204.250	APBD		2 kali/ dokumen	288.204.250



4.3. Target Kinerja Program dan Kegiatan

Sebagaimana termuat dalam penyusunan rencana kerja yang mengisyaratkan adanya perbaikan dalam pencapaian hasil dari program dan kegiatan, sebagai bahan evaluasi, mampu memperbaiki kinerja jajaran Sekretariat DPRD dan juga menjadi tolok ukur secara objektif sesuai dengan indikator yang telah ditentukan, maka untuk Tahun 2023 dengan memperhatikan hasil pencapaian realisasi program dan kegiatan Tahun 2021 yang termuat dalam monev serta dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka perkiraan/estimasi target kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel :
Target Program dan Kegiatan 2023

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Realisasi	
		Fisik (%)	Keu (%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90	81,07
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	100	81,55
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	100	81,55
	- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	100	81,55
	- Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	100	81,55
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	88,42
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	88,75
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	90,15
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	92,00	90,70
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91,90	88,15
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90,00	84,24



	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87,71	87,15
	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75,40	71,25
	-	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	89,45
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	89,66
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	82,22	75,90
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91,00	77,54
5.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	-	Pengadaan Mebel	70,00	64,81
6.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	94,22
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	95,40
7.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	77,80
	-	Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair	100	75,25
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70,65	68,95
	-	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	94,25
	-	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	88,60
8.		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
	-	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	100	92,62
	-	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	50	44,10
9.		Layanan Administrasi DPRD		
	-	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	90,15	88,80
II.		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		
1.		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
	-	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	85	82,25
	-	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	91	82,76
	-	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	84	80,35



	-	Penyusunan Tata Tertib DPRD	75	72,85
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran			
	-	Pembahasan KUA dan PPAS	100	95,15
	-	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	100	95,40
	-	Pembahasan APBD	100	95,70
	-	Pembahasan APBD Perubahan	100	95,40
	-	Pembahasan Laporan Semester	60	55,38
	-	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	100	93,80
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
	-	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum	85,65	82,40
	-	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	85,65	82,40
	-	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	85,65	82,40
	-	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	85,65	82,40
	-	Pengawasan Tindakan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan pemeriksaa Keuangan	75,35	72,47
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD			
	-	Pendalaman Tugas DPRD	85,75	81,40
	-	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	91,00	89,55
	-	Penyediaan kelompok Pakar dan Tim Ahli	70,40	66,90
	-	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	100	90,80
	-	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	91,00	83,26
	-	Penyusunan Program Kerja DPRD	100	93,20
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
	-	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	55,70	50,80
	-	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	57,00	55,60
	-	Pelaksanaan Reses	100	92,50
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			
	-	Penyusunan Kode Etik DPRD	75	72,85
7.	Pembahasan Kerja Sama Daerah			
	-	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	84,50	80,42
8.	Fasilitasi Tugas DPRD			



-	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	90,00	87,05
-	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	85,00	82,70
-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	90,15	88,75
-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	70,35	68,60

Rencana Tindak Pengendalian

Program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023 yang dikelola oleh seluruh Bagian sesuai rencana yang telah ditentukan diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan melibatkan seluruh pegawai yang ada dan melibatkan bagian-bagian lainnya dalam rangka koordinasi, penyesuaian data informasi, pembahasan dan penyusunan. Selain itu ada beberapa kegiatan yang melibatkan para anggota DPRD pada saat pembahasan dan penyusunannya melalui panitia khusus atau pansus DPRD sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya.

Namun demikian kerap kali dalam proses pelaksanaan terdapat hambatan, kendala, masalah yang harus dicermati agar program dan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel
Rencana Tindak Pengendalian

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Resiko		Penyebab		C/UC	Dampak
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Data penyusunan, rencana kerja dan anggaran	Bagian Keuangan	Kesiapan data, koordinasi dan komunikasi	Internal/ semua bagian/ eksternal	C	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Data penyusunan, rencana kerja dan anggaran	Bagian Keuangan	Kesiapan data, koordinasi dan komunikasi	Internal/ semua bagian/ eksternal	C	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Data penyusunan, rencana kerja dan anggaran	Bagian Keuangan	Kesiapan data, koordinasi dan komunikasi	Internal/ semua bagian/ eksternal	C	
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Data penyusunan, rencana kerja dan anggaran	Bagian Keuangan	Kesiapan data, koordinasi dan komunikasi	Internal/ semua bagian/ eksternal	C	
	Koordinasi dan penyusunan	Data penyusunan,	Bagian	Kesiapan data,	Internal/	C	



	perubahan DPA-SKPD	rencana kerja dan anggaran	Keuangan	koordinasi dan komunikasi	semua bagian/ eksternal		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Data penyusunan, data kinerja, informasi OPD	Bagian Keuangan	Kesiapan data, koordinasi dan komunikasi	Internal / eksternal	C	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sumber anggaran, informasi ASN	Bagian Keuangan	Pagu anggaran, kesiapan data ASN	Internal	C	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Realisasi anggaran, estimasi kebutuhan, koordinasi	Bagian Keuangan	Data realisasi, perhitungan kebutuhan, koordinasi	Internal	C	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Proses ULP, Waktu dan penunjukan lelang	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan ketersediaan	Internal / eksternal	C	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Undangan, waktu, koordinasi	Bagian Umum	Undangan, waktu, koordinasi	Internal / eksternal	C	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kerusakan, ketersediaan komponen	Bagian Umum	Komunikasi dan ketersediaan	Internal	C	
	Penyediaan Peralatan Kantor	Ketersediaan dan pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi dan ketersediaan	Internal	C	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ketersediaan, pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi dan ketersediaan	Internal	C	
	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan, pemesanan, proses penunjukan	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan ketersediaan	Internal / eksternal	C	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Aturan terbaru, ketersediaan dan waktu	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan koordinasi	Internal / eksternal	C	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu, adanya kunjungan, jamuan tamu	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan kunjungan kerja	Internal / eksternal	C	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Undangan, agenda Banmus, waktu pelaksanaan	Bagian Umum	Koordinasi, Komunikasi, hasil Banmus	Internal / eksternal	C	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Pengadaan Mebel	Ketersediaan dan pemeliharaan	Bagian Umum	Kerusakan, penggantian	Internal	C	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan, pembayaran, pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi, ketersediaan	Internal	C	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Anggaran, kebersihan, Pemeliharaan	Bagian Umum	Sumber daya, komunikasi	Internal	C	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Ketersediaan, waktu pajak, koordinasi	Bagian Umum	Koordinasi, pemeliharaan	Internal / eksternal	C	



	atau Kendaraan Dinas Jabatan						
	Pemeliharaan mebel	Ketersediaan, waktu, perawatan	Bagian Umum	Komunikasi dan pelaksanaan	Internal / eksternal	C	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ketersediaan, waktu dan pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi dan pelaksanaan	Internal / eksternal	C	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ketersediaan, kebersihan, pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan sumber daya	Internal / eksternal	C	
	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketersediaan, kebersihan, pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan sumber daya	Internal / eksternal	C	
8.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sumber daya, Stakeholder, sumber anggaran	Bagian Umum	Waktu, ketersediaan	Internal	C	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sumber daya, Stakeholder, sumber anggaran	Bagian Umum	Waktu, ketersediaan	Internal / eksternal	C	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sumber daya, Stakeholder, sumber anggaran	Bagian Umum	Koordinasi, Komunikasi, waktu	Internal / eksternal	C	
9.	Layanan Administrasi DPRD						
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Hasil Banmus, waktu, sumber daya	Bagian Umum	Komunikasi, waktu, sumber daya, pembinaan	Internal / eksternal	C	
II.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRA						
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Banmus, data raperda, waktu, pansus	Bagian Persidangan	Koordinasi, Komunikasi, sumber data	Internal / eksternal	C	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Banmus, data raperda, waktu, pansus	Bagian Persidangan	Koordinasi, Komunikasi, sumber data	Internal / eksternal	C	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	Banmus, data raperda, waktu, pansus	Bagian Persidangan	Koordinasi, Komunikasi, sumber data	Internal / eksternal	C	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Banmus, aturan, waktu, pansus	Bagian Persidangan	Aturan, waktu, pansus	Internal	C	
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran						
	Pembahasan KUA dan PPAS	Banmus, RKPD, waktu ban ang	Bagian Persidangan	Koordinasi, waktu, RKPD	Internal / eksternal	C	
	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Banmus, RKPD, waktu ban ang	Bagian Persidangan	Koordinasi, waktu, RKPD	Internal / eksternal	C	
	Pembahasan APBD	Banmus, RKPD, waktu ban ang	Bagian Persidangan	Komunikasi, waktu, data anggaran	Internal / eksternal	C	
	Pembahasan APBD Perubahan	Banmus, RKPD, waktu ban ang	Bagian Persidangan	Komunikasi, waktu, data anggaran	Internal / eksternal	C	
	Pembahasan Laporan Semester	Koordinasi, data realisasi, waktu	Bagian Persidangan	Koordinasi, waktu, data keuangan	Semua bagian	C	
	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Banmus, waktu, mitra kerja	Bagian Persidangan	Koordinasi, waktu, realisasi keuangan	Internal / eksternal		
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						



	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum	Banmus, waktu, pelaksanaan, mitra kerja	Bagian Garwas	Koordinasi, pelaksanaan, mitra kerja	Internal / eksternal	C	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Banmus, waktu, pelaksanaan, mitra kerja	Bagian Garwas	Koordinasi, pelaksanaan, mitra kerja	Internal / eksternal	C	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Banmus, waktu, pelaksanaan, mitra kerja	Bagian Garwas	Koordinasi, pelaksanaan, mitra kerja	Internal / eksternal	C	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Banmus, waktu, pelaksanaan, mitra kerja	Bagian Garwas	Koordinasi, pelaksanaan, mitra kerja	Internal / eksternal	C	
	Pengawasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Mitra kerja, waktu, laporan keuangan, mitra kerja	Bagian Garwas	Koordinasi, waktu, mitra kerja	Internal / eksternal	C	
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD						
	Pendalaman Tugas DPRD	Banmus, sumber daya, stakeholder	Bagian Garwas	Komunikasi, waktu dan pelaksanaan	Internal / eksternal	C	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Data kegiatan, media, waktu	Bagian Garwas	Komunikasi, waktu, media	Internal	C	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Banmus, sumber daya, stakeholder, anggaran	Bagian Garwas	Komunikasi, waktu, sumber daya	Internal	C	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Regulasi, sumber daya, waktu, laporan	Bagian Garwas	Komunikasi, sumber daya, waktu	Internal	C	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sumber daya, stakeholder, waktu	Bagian Garwas	Komunikasi, sumber daya waktu	Internal / eksternal	C	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Banmus, rencana kerja, waktu, sumber anggaran	Bagian Garwas	Komunikasi, waktu, rencana kerja	Internal	C	
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Banmus, sumber daya, pelaporan	Bagian Garwas	Komunikasi, waktu, laporan	Internal	C	
	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Reses, data, stakeholder	Bagian Garwas	Komunikasi, waktu, laporan	Internal		
	Pelaksanaan Reses	Reses, data, stakeholder	Bagian Garwas	Komunikasi, waktu, laporan	Internal / eksternal		
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Banmus, aturan, waktu, pansus	Bagian Garwas	Komunikasi, waktu, aturan	Internal	C	
7	Pembahasan Kerja Sama Daerah						
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Komunikasi, data kegiatan, waktu,	Bagian Pesidangan	Komunikasi, data kegiatan	Internal / eksternal	C	
8.	Fasilitasi Tugas DPRD						
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Banmus, tujuan, waktu, laporan	Bagian Pesidangan	Koordinasi, waktu, laporan	Internal / eksternal	C	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Banmus, data kinerja, waktu	Bagian Pesidangan	Koordinasi, waktu, laporan	Internal / eksternal	C	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kinerja, mitra kerja, waktu	Bagian Pesidangan	Koordinasi, waktu, laporan	Internal / eksternal	C	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Kinerja, mitra kerja, waktu	Bagian Pesidangan	Koordinasi, waktu, laporan	Internal / eksternal	C	



Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap satuan kerja perangkat daerah untuk membuat perjanjian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Perjanjian kinerja tersebut dimasukan dalam penyusunan rencana kerja yang berorientasi kepada hasil dan laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah yang akan direviu oleh Inspektorat Wilayah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta memperhatikan arahan dari Inspektorat Wilayah Kabupaten Tangerang, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang membuat perjanjian kinerja sebagaimana dibawah ini :

PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. DADANG NUGRAHA

Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. ZAKI ISKANDAR

Jabatan : Bupati Tangerang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.



Tigaraksa,2022.

Menyetujui,
Bupati Tangerang/Sekretaris Daerah
Kabupaten Tangerang

Sekretaris DPRD
Kabupaten Tangerang

Perjanjian kinerja seperti tersebut diatas berlaku pula untuk jabatan struktural dilingkup Sekretariat DPRD, secara berjenjang membuat perjanjian kinerja dari eselon III kepada eselon II dan eselon IV kepada eselon III.

Pada lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 perjanjian kerja yang dibuat disertai dengan lampiran perjanjian kinerja sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	Terlaksananya pembahasan pra raperda Tersedianya perda Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik Tersedianya tata tertib DPRD Jumlah rapat pembahasan KUA PPAS Jumlah rapat pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS Jumlah rapat pembahasan APBD Jumlah rapat pembahasan perubahan APBD Jumlah rapat pembahasan laporan semesteran Jumlah rapat pembahasan pertanggung jawaban APBD Jumlah rapat pengawasan bidang	2 keg 16 perda 8 dok 1 dok 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali



			pemerintahan dan hukum	4 kali
			Jumlah rapat pengawasan bidang infrastruktur	4 kali
			Jumlah rapat pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	4 kali
			Jumlah rapat pengawasan bidang perekonomian	4 kali
			Jumlah rapat pengawasan tindak lanjut pemeriksaan laporan BPK	3 kali
			Terlaksananya kegiatan bimtek	
			Jumlah publikasi dan dokumentasi	6 kali
			Terfasilitasinya kegiatan fraksi	12 bulan
			Jumlah hubungan masyarakat yang difasilitasi	12 bulan
				100 kali
			Tersusunnya program kerja DPRD	
			Jumlah laporan kunjungan kerja dalam daerah	1 dok
				50 lap
			Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran	50 dok
			Jumlah pelaksanaan reses	
			Tersedianya kode etik DPRD	3 kali
			Jumlah konferensi pers	1 dok
			Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12 bulan
				95 kali
			Jumlah dokumen laporan kinerja DPRD	1 dok
2.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang	-	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen

Dari 2 (dua) sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dengan 17 kegiatan dan 60 sub kegiatan yang tersebar pada Bagian Umum, Bagian Pengawasan dan Penganggaran, Bagian Program dan Keuangan dan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. Sasaran strategis yang dijabarkan dalam lebih kurang 60 kegiatan dalam pelaksanaannya memerlukan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riil serta akan dihitung dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi serta akan di konsultasikan dan di koordinasikan dengan panitia khusus DPRD dalam pembahasan anggaran Tahun 2023.

**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2023, tersebar di 2 Program dan 17 kegiatan, kegiatan dan pendanaan yang dibutuhkan disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.1

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023**

NO	Program/Kegiatan	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	SEKRETARIAT DPRD	17	125,046,263,572	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9	73,383,611,572	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		135,927,500	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11,176,124,136	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		517,548,000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		12,783,317,100	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		96,291,700	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		545,700,000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,661,043,600	
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		44,510,323,536	
9	Layanan Administrasi DPRD		1,957,336,000	
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	8	51,662,652,000	
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		3,718,852,500	
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran		979,272,000	



NO	Program/Kegiatan	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		1,434,756,000	
4	Peningkatan Kapasitas DPRD		8,605,436,600	
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		8,660,200,000	
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		28,124,500	
7	Pembahasan Kerja Sama Daerah		199,980,000	
8	Fasilitasi Tugas DPRD		28,036,030,400	



Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatang Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian sasaran/program dalam Renja OPD terhadap RKPD dan Renstra OPD terhadap RPJMD	Setwan	85,96 %	73.383.611.572	APBD		85,96 %	72.905.779.576
	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja SKPD	Setwan	90,45 %	135.927.500	APBD		90,45 %	143.985.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Setwan	3 dokumen	64.477.500	APBD		3 dokumen	64.979.500
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Setwan	1 dokumen	18.745.000	APBD		1 dokumen	20.650.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Setwan	1 Dokumen	11.070.000	APBD		1 Dokumen	15.495.000
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Setwan	1 dokumen	19.945.000	APBD		1 dokumen	20.650.000
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi	Setwan	1 dokumen	11.520.000	APBD		1 dokumen	13.016.000



Kode	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatang Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Setwan	1 dokumen	10.170.000	APBD		1 dokumen	9.195.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen laporan keuangan	Setwan	91,30%	11.176.124.136	APBD		91,30%	11.058.360.440
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya pemenuhan gaji ASN	Setwan	1 dokumen	11.167.529.136	APBD		1 dokumen	11.049.619.940
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Setwan	1 dokumen	8.595.000	APBD		1 dokumen	8.740.500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan	Setwan	1 dokumen	8.050.000	APBD		1 dokumen	8.050.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pegawai	Setwan	92,20%	517.548.000	APBD		92,20%	517.548.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya	Setwan	70 stel	150.948.000	APBD		70 stel	150.948.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Setwan	52 orang	366.600.000	APBD		52 orang	366.600.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana penunjang kantor	Setwan	90,10%	12.783.317.100	APBD		90,10%	13.103.408.000



Kode	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatang Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen penerangan kantor	Setwan	1 jenis	75.007.400	APBD		1 jenis	75.007.400
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Setwan	7 jenis	526.091.700	APBD		7 jenis	510.055.600
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Setwan	7 jenis	252.046.000	APBD		7 jenis	508.622.100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Setwan	3 jenis	250.071.400	APBD		3 jenis	250.071.900
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Setwan	4 jenis	150.500.000	APBD		4 jenis	230.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya jamuan makan tamu	Setwan	5000 dus	894.750.000	APBD		5000 dus	894.800.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya laporan kunjungan kerja	Setwan	88 kali	10.634.850.600	APBD		88 kali	10.634.851.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya mebel	Setwan	77,60%	96.291.700	APBD		77,60%	98.140.000
	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Setwan	5 unit	96.291.700	APBD		5 unit	98.140.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa komunikasi	Setwan	78,15%	545.700.000	APBD		78,15%	545.783.200
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Setwan	12 bulan	60.000.000	APBD		12 bulan	60.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Setwan	12 bulan	485.700.000	APBD		12 bulan	485.783.200



Kode	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatang Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pegawai	Setwan	90,00%	1.661.043.600	APBD		90,00%	1.752.921.700
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Setwan	4 item	734.442.000	APBD		4 item	827.766.000
	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel	Setwan	5 unit	56.000.000	APBD		5 unit	56.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	Setwan	15 item	143.310.000	APBD		15 item	143.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	Setwan	1 unit	477.503.600	APBD		1 unit	477.503.600
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Setwan	25 unit	249.788.000	APBD		25 unit	248.152.100
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pemenuhan administrasi keuangan DPRD	Setwan	71,95%	44.510.323.536	APBD		71,95%	43.977.382.736
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya hak keuangan DPRD	Setwan	50 orang	42.933.342.736	APBD		50 orang	42.933.342.736
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian dinas dan atribut DPRD	Setwan	200 paket	1.398.215.000	APBD		200 paket	865.290.000
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya medical check up	Setwan	50 orang	178.765.800	APBD		50 orang	178.750.000
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan rapat-rapat DPRD	Setwan	88,00%	1.957.336.000	APBD		88,00%	1.708.250.000



Kode	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatang Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Setwan	95 kali	1.957.336.000	APBD		95 kali	1.708.250.000
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan tugas dan fungsi DPRD	Setwan	82,37%	51.662.652.000	APBD		82,37%	57.140.483.996
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Pembahasan dan pembentukan Raperda	Setwan	74,60%	3.718.852.500	APBD		74,60%	3.520.284.300
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Setwan	2 kegiatan	454.369.400	APBD		2 kegiatan	464.049.200
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya pembahasan rancangan perda	Setwan	16 perda	2.519.882.000	APBD		16 perda	2.305.634.000
	Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Terlaksananya fasilitasi penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik	Setwan	8 dokumen	710.743.000	APBD		8 dokumen	716.743.000
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya tata tertib DPRD	Setwan	1 dokumen	33.858.100	APBD		1 dokumen	33.858.100
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pemenuhan pembahasan anggaran	Setwan	90,00%	979.272.000	APBD		90,00%	975.838.080
	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	Setwan	1 kali	156.702.400	APBD		1 kali	155.769.520
	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS perubahan	Setwan	1 kali	156.702.400	APBD		1 kali	155.769.520
	Pembahasan APBD	Terlaksananya pembahasan APBD	Setwan	1 kali	156.702.400	APBD		1 kali	155.769.520



Kode	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatang Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya pembahasan APBD perubahan	Setwan	1 kali	156.702.400	APBD		1 kali	155.769.520
	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya pembahasan laporan semesteran	Setwan	2 kali	76.060,000	APBD		2 kali	76.940.000
	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Terlaksananya pembahasan Pertanggungjawana APBD	Setwan	1 kali	276.402.400	APBD		1 kali	275.820.000
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pemenuhan pengawasan pemerintahan	Setwan	91,65%	1.710.576.000	APBD		91,65%	1.385.612.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintahan dan hukum	Setwan	4 kali	332.592.000	APBD		4 kali	245.922.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur	Setwan	4 kali	323.016.000	APBD		4 kali	253.104.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	Setwan	4 kali	323.016.000	APBD		4 kali	232.740.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintah bidang perekonomian	Setwan	4 kali	332.592.000	APBD		4 kali	260.286.000
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya pengawasan tindaklanjut pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	Setwan	2 kali	123.540.000	APBD		2 kali	117.740.000
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah	Terlaksanakanya pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala	Setwan	1 kali	275.820.000	APBD		1 kali	275.820.000



Kode	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatang Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		daerah							
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pemenuhan kapasitas DPRD	Setwan	90,00%	9.033.934.600	APBD		90,00%	8.726.154.600
	Pendalaman Tugas DPRD	Terselenggaranya pendalaman tugas DPRD	Setwan	6 kali	1.635.000.000	APBD		6 kali	1.615.000.000
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya penyebar luasan produk hukum, daerah publikasi dan dokumentasi dewan	Setwan	12 bulan	2.124.680.000	APBD		12 bulan	1.836.900.000
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya kelompok pakar dan tim ahli	Setwan	3 orang	370.600.000	APBD		3 orang	370.600.000
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya tenaga ahli fraksi	Setwan	12 bulan	792.240.000	APBD		12 bulan	792.240.000
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya hubungan masyarakat	Setwan	100 kali	4.053.516.600	APBD		100 kali	4.053.516.600
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya rencana kerja DPRD	Setwan	1 dokumen	57.898.000	APBD		1 dokumen	57.898.000
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan Reses	Setwan	90,85%	8.660.200.000	APBD		90,85%	8.665.547.120
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja	Setwan	3 kali	631.425.000	APBD		3 kali	643.089.000
	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD	Setwan	3 kali	56.005.000	APBD		3 kali	62.199.320
	Pelaksanaan Reses	Terselenggaranya reses	Setwan	3 kali	7.972.770.000	APBD		3 kali	7.960.258.800
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pemenuhan dokumen kode etik	Setwan	81,10%	28.123.100	APBD		81,10%	28.123.100



Kode	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatang Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya kode etik dan tata beracara	Setwan	1 dokumen	28.124.500	APBD		1 dokumen	28.123.100
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi	Setwan	76,40%	199.980.000	APBD		76,40%	199.980.000
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tersusunnya bahan komunikasi dan publikasi	Setwan	12 bulan	199.980.000	APBD		12 bulan	199.980.000
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pemenuhan koordinasi dan konsultasi DPRD	Setwan	82,45%	28.446.874.650	APBD		82,45%	33.639.921.396
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Setwan	95 kali	27.995.488.000	APBD		95 kali	33.165.387.146
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya laporan fraksi, alat kelengkapan kinerja DPRD	Setwan	1 dokumen	40.542.400	APBD		1 dokumen	63.690.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan badan musyawarah	Setwan	48 kali/dokumen	122.640.000	APBD		48 kali/dokumen	122.640.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	Setwan	2 kali/dokumen	288.204.250	APBD		2 kali/dokumen	288.204.250



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2019 - 2023, yang disusun secara sinergi dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Rencana Kerja ini merupakan pedoman bagi jajaran organisasi yang berada dilingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 tahun yang akan datang.

Optimalisasi hasil pelaksanaan kegiatan pencapaian kinerja yang diharapkan, setiap bagian dari organisasi yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA) yang tepat, akurat dan terencana dengan baik.

Selain itu, pada saat kegiatan akan dilaksanakan, setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melakukan pengendalian secara periodik dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi baik terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran sehingga program dan kegiatan yang akan telah direncanakan dapat terkontrol dari segi waktu pelaksanaan maupun dari segi anggaran. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.